

B. Pencapaian Kinerja

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang sebagai salah satu unit kerja Eselon 2 lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian dalam mendukung program kerja kementerian telah menetapkan standar kinerja 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BBPP Lembang Tahun 2015 - 2019. Empat sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 meliputi : (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang; (2) Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian; (3) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang; (4) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015).

Hasil pengukuran kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang pada tahun 2018, disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7 : Hasil Pengukuran Kinerja BBPP Lembang Tahun 2018 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Lembang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang	3.75 Skala Likert (1-4)	3,75	100
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian	2. Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian	22%	18,81%	116,96
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPP Lembang	3. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang	0	0	100
		4. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	0	0	100

Rata rata

104,24%

Jumlah Pagu Anggaran DIPA Tahun 2018
Setelah Revisi Jumlah Pagu Anggaran DIPA 2018

: Rp. 20.578.032.000,-
: Rp. 19.934.767.000,-

Berdasarkan 4 (empat) kegiatan indikator kinerja outcome, maka pencapaian masing-masing kegiatan indikator kinerja outcome tersebut adalah sebagai berikut :

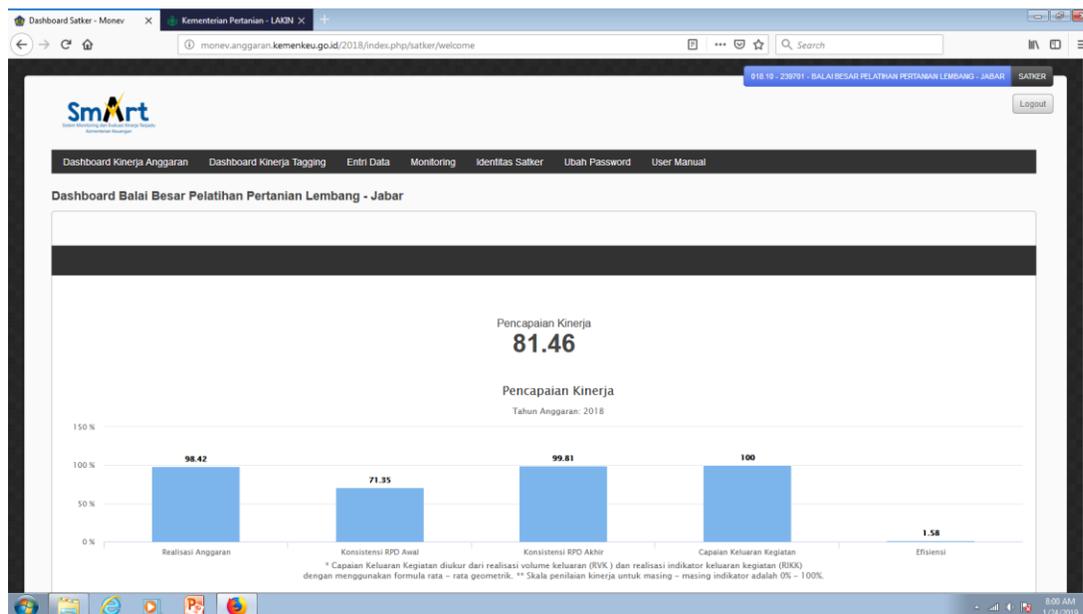
- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang = 3.75 (skala likert) dari target 3.75
- 2) Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian = 18,81 % dari target 22.00 %
- 3) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang = 0 temuan dari target 0 (nol) temuan.
- 4) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) = 0 temuan dari target 0 (nol) temuan.

Secara totalitas realisasi fisik rata-rata capaian kinerja sudah tercapai. Hal ini dikarenakan capaian kinerja dihitung berdasarkan rata rata pencapaian kegiatan. Tabel 6 diatas menunjukkan rata rata persentase capaian kinerja BBPP Lembang adalah 104,24%, yaitu telah mencapai target "**SANGAT BERHASIL**". Khususnya pada indikator Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian dimana persentase capaian targetnya adalah 116,96% dan merupakan Capaian target tertinggi dengan kategori "**Sangat Berhasil**". Untuk capaian kinerja pada 3 (tiga) indikator lainnya, masuk dalam kategori "**Berhasil**" dengan capaian masing masing indikator sebesar 100%, yaitu terdapat pada indikator (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang, (2) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang, (3) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), nilai kerja BBPP Lembang sebesar 87,21% atau termasuk dalam kategori Baik. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPP Lembang dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1.
Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran BBPP Lembang

Tahun 2018 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011



Persentase Capaian Kinerja anggaran BBPP Lembang 2018 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 98,42%.
2. Persentase Capaian Kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 71,35%
3. Persentase Capaian Kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Akhir adalah 99.81%
4. Persentase Capaian Kinerja dalam hal Pencapaian Keluaran adalah 100.00%
5. Capaian Kinerja dalam hal Efisiensi adalah 1,58%

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 249/2011 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana : NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

*Catatan : Rumus Nilai Efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja BBPP Lembang Tahun 2018 dalam hal Efisiensi adalah mencapai 1,58%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (1,58\%/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,0008 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,04 \\ &= 0,54 \text{ atau } 54\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran BBPP Lembang tahun 2018 adalah 54%.

Selanjutnya Pengukuran Nilai Efisiensi juga dilakukan terhadap masing masing indikator kinerja utama (IKU) dan perhitungan secara lengkap disampaikan pada Lampiran 3.

Analisis atas capaian kinerja BBPP Lembang tahun 2018 berdasarkan indikator dari sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Lembang

1. Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang

Salah satu upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui penjangkaran atau pengumpulan data dari masyarakat mengenai persepsi mereka terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh instansi pemerintah selama ini. Instrumen yang digunakan untuk penjangkaran informasi tersebut adalah daftar pertanyaan atau kuesioner yang menyangkut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data IKM tersebut merupakan tolok ukur untuk

menilai tingkat mutu pelayanan dan menjadi bahan evaluasi bagi pelayanan yang masih memerlukan perbaikan sekaligus menjadi pendorong setiap unit kerja pelayanan publik dalam meningkatkan mutu pelayanannya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang pelatihan pertanian bagi aparatur maupun non-aparatur. BBPP Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non-aparatur pertanian. Jadi sebagai bagian integral dari kelembagaan Kementerian Pertanian, BBPP Lembang bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik aparatur dan non-aparatur di bidang pelatihan pertanian, utamanya pelatihan pertanian di bidang hortikultura (sayuran, tanaman hias dan buah-buahan). Atas dasar amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/ OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, maka pada setiap semester BBPP Lembang melakukan kegiatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan ke depan.

Tujuan pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah untuk : (a) mengetahui tingkat pencapaian kinerja BBPP Lembang dalam melayani peserta pelatihan; (b) mewujudkan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang mudah sehingga dapat dilaksanakan secara lebih bermutu, berdayaguna dan berhasil guna; (c) menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan publik. Kemudian laporan pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengukuran IKM bertujuan menyajikan data dan informasi mengenai hasil yang diperoleh dari pengukuran IKM sebagai gambaran tentang kinerja yang dicapai oleh BBPP Lembang dalam pelaksanaan tugasnya.

Metode pengukuran IKM dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui pengisian instrumen berupa kuesioner terstruktur yang diterbitkan

Kementerian Pertanian oleh para pengguna layanan BBPP Lembang (peserta Pelatihan, magang/study banding, praktek kerja lapangan).

Manfaat yang diharapkan dari pengukuran dan penyusunan laporan IKM meliputi: (a) tersedianya informasi tentang kinerja dan kekurangan dari masing-masing unsur penyelenggaraan pelayanan publik; (b) tersedianya informasi sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik; (c) memacu persaingan positif antar unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik.

Unsur pelayanan publik lingkup Kementerian Pertanian berdasarkan Permentan Nomor: 19/Permentan/OT.040/4/2018 tertanggal 23 April 2018 terdiri dari 9 unsur pelayanan sedangkan penilaian persepsi kepuasan masyarakat berdasarkan Permentan sebelumnya terdiri dari 14 unsur layanan, sehingga dilakukan konversi dari unsur sebelumnya menjadi unsur pelayanan publik berdasarkan Permentan tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu minimal sebanyak 9 unsur.

Konversi dari 14 unsur menjadi 9 unsur layanan publik, berdasarkan asumsi kesamaan unsur pelayanan publik yang tertuang dalam Permentan Nomor 78 Tahun 2013 dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2018, dengan asumsi konversi sebagai berikut :

Tabel 8. Konversi 14 Unsur Menjadi 9 Unsur IKM Terhadap Pelayanan BBPP Lembang Tahun 2018

SEMULA		MENJADI	
No Unsur	Unsur Pelayanan Publik Berdasarkan Permentan No. 78 Tahun 2013	No Unsur	Unsur Pelayanan Publik Berdasarkan Permentan No. 19 Tahun 2018
1	Prosedur Pelayanan	2	Prosedur
2	Persyaratan Pelayanan	1	Persyaratan
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	5	Produk Layanan
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	-	-
5	Tanggungjawab Petugas Pelayanan	-	-
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	6	Kompetensi Pelaksana
7	Kecepatan Pelayanan	3	Waktu Pelayanan
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	9	Sarana dan Prasarana
9	Kesopanan dan Keramahan	7	Perilaku Pelaksana

SEMULA		MENJADI	
No Unsur	Unsur Pelayanan Publik Berdasarkan Permentan No. 78 Tahun 2013	No Unsur	Unsur Pelayanan Publik Berdasarkan Permentan No. 19 Tahun 2018
	Petugas		
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	4	Biaya/Tarif
11	Kepastian Biaya Pelayanan	-	-
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	-	-
13	Kenyamanan Lingkungan	-	-
14	Keamanan Pelayanan	8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan

Kesembilan unsur pelayanan publik tersebut memiliki prinsip dasar, yaitu sederhana, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, transparansi, dan keadilan. Unsur pelayanan publik, minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. **Persyaratan**, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrative dan teknis;
2. **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik;
4. **Biaya/tarif**, yaitu besaran biaya atau tarif yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau mendapatkan pelayanan dari UKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Sarana dan prasarana**, yaitu penunjang utama terselenggaranya pelayanan publik dan alat atau bahan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan publik.

Responden pengukuran IKM terhadap pelayanan BBPP Lembang adalah para peserta pelatihan pertanian yang dilaksanakan di BBPP Lembang, pengguna balai lainnya seperti peserta Pelatihan kerjasama, mahasiswa, dan pelajar. Jumlah pengguna atau yang berlatih di BBPP Lembang selama Tahun 2018 mencapai ±723 orang peserta, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Pengguna Jasa BBPP Lembang Tahun 2018

NO	RESPONDEN	JUMLAH (ORANG)
1	Peserta Pelatihan Aparatur	560
4	Pelajar/SMK (Prakerin)	163
JUMLAH		723

Penetapan jumlah responden dilakukan berdasarkan rumus dan tabel sampel Morgan dan Krejcie. Penghitungan berdasarkan rumus, sebagai berikut:

$$S = \{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\} / \{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}$$

Keterangan :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

Penetapan jumlah responden yang menggunakan pelayanan publik di BBPP Lembang selama Bulan Januari – Juni 2018, berdasarkan rumus adalah:

$$\{0,05 \cdot 390 \cdot 0,5\} / \{0,01^2 (390 - 1) + 0,05 \cdot 0,5 \cdot 0,5\} = 189,68$$

Penghitungan jumlah responden berdasarkan tabel sampel Morgan dan Krejcie, hampir sama dengan jumlah penghitungan dengan rumus, yaitu dengan populasi 390, membutuhkan sampel sebanyak 193 reponden.

Berdasarkan kedua perhitungan, maka ditetapkan jumlah responden untuk mengikuti survey kepuasan masyarakat selama Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Jumlah Responden IKM BBPP Lembang Tahun 2018

NO	RESPONDEN	JUMLAH (ORANG)
1	Peserta Pelatihan Aparatur	560
4	Pelajar/SMK (Prakerin)	163
JUMLAH		723

Nilai persepsi kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang diberikan oleh BBPP Lembang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

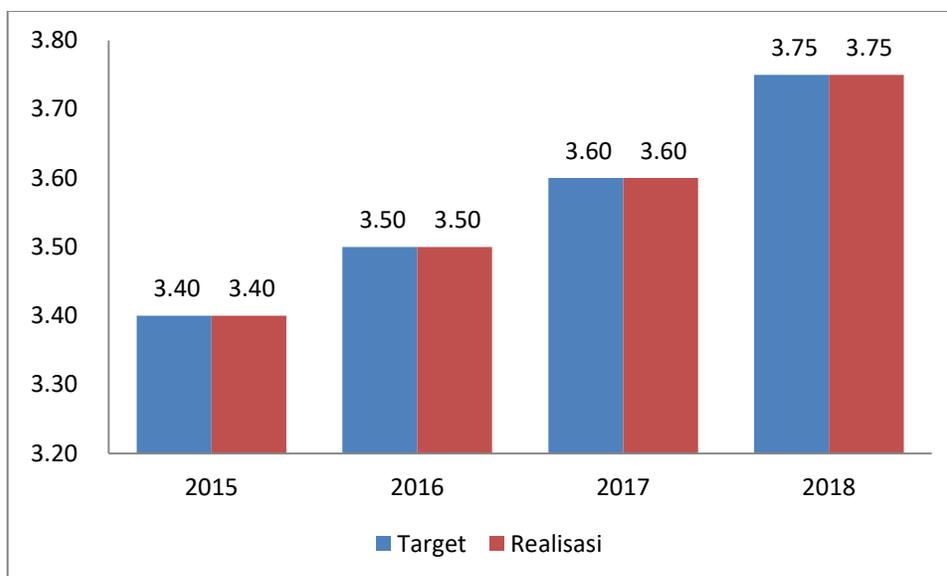
Tabel 11. Nilai Persepsi IKM Terhadap Pelayanan BBPP Lembang Tahun 2018

NO. UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,92
U2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,66
U3	Waktu penyelesaian	3,64
U4	Biaya atau tarif	3,72
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan publik	3,65
U6	Kompetensi pelaksana	3,81
U7	Perilaku pelaksana	3,76
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,92
U9	Prasarana dan sarana	3,75
NILAI RATA-RATA TERTIMBANG		3,75

Secara rata-rata kumulatif atau keseluruhan, nilai persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan yang diberikan oleh BBPP Lembang Tahun 2018 mencapai 3,75 atau sebesar 100% dari target 3,75 dengan rentang interval 3,64 sampai dengan 3,92 sehingga masuk kategori “**Berhasil**”. Capaian kinerja ini merupakan capaian tertinggi selama 4 (empat) tahun terakhir.

Pencapaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang pada tahun 2015 hingga tahun 2018 disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang tahun 2015 – 2018



Nilai Interval IKM di BBPP Lembang meliputi:

1. Persyaratan : 3 - 4
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur : 3 - 4
3. Waktu penyelesaian : 3 - 4
4. Biaya atau tarif : 3 - 4
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan publik : 3 - 4
6. Kompetensi pelaksana : 3 - 4
7. Prilaku pelaksana : 3 - 4
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan : 2 - 4
9. Prasarana dan sarana : 2 - 4

Secara kumulatif atau keseluruhan. interval IKM terhadap pelayanan pelatihan pertanian oleh BBPP Lembang berkisar antara 2 hingga 4.

Nilai Interval Konversi IKM terhadap pelayanan BBPP Lembang adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai Interval Konversi IKM Terhadap Pelayanan BBPP Lembang Tahun 2018

NO. UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI KONVERSI
U1	Persyaratan	97,96
U2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	91,46
U3	Waktu penyelesaian	90,98
U4	Biaya atau tarif	93,01
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan publik	91,25

NO. UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI KONVERSI
U6	Kompetensi pelaksana	95,33
U7	Perilaku pelaksana	93,91
U8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	98,06
U9	Prasarana dan sarana	93,67
NILAI IKM		93,96

Secara kumulatif, interval konversi IKM terhadap pelayanan pelatihan pertanian oleh BBPP Lembang Tahun 2018 berkisar antara 90,98 hingga 92,31 dengan nilai rata-rata konversi sebesar 93,96.

Mutu Pelayanan BBPP Lembang dengan nilai konversi IKM untuk setiap unsur pelayanan sudah sangat baik, karena sudah mencapai nilai lebih dari 88,31.

Secara rinci, mutu layanan setiap unsur adalah :

1. Persyaratan : Sangat Baik
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur : Sangat Baik
3. Waktu penyelesaian : Sangat Baik
4. Biaya atau tarif : Sangat Baik
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan publik : Sangat Baik
6. Kompetensi pelaksana : Sangat Baik
7. Perilaku pelaksana : Sangat Baik
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan : Sangat Baik
9. Prasarana dan sarana : Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Lembang Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelatihan Pertanian

2. Indikator : Penurunan rata – rata competency gap index peserta pelatihan pertanian

Competency Gap Index (CGI) adalah kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan yang dimiliki individu tersebut.

Penilaian CGI dapat menggunakan beberapa alternatif sebagai berikut Assesment center, Wawancara perilaku (berbasis kompetensi), Metode 360 derajat dan metode alternatif lainnya. Hasil penilaian CGI Diperoleh dari selisih standar kompetensi kerja dengan nilai kompetensi individu. Nilai kompetensi individu diperoleh dari hasil pre test, post test, pemahaman materi dan nilai sikap perilaku peserta. Nilai CGI yang diperoleh BBPP Lembang pada pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebesar 18,81% dari target yang ditetapkan sebesar 22.00%. Artinya semakin kecil kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan dari target yang ditetapkan, nilai CGI yang diperoleh tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator Penurunan rata – rata competency gap index peserta pelatihan pertanian adalah sebesar 116,96% sehingga masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

Secara rinci Penurunan rata – rata competency gap index peserta pelatihan pertanian di BBPP Lembang Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target nilai CGI ditahun 2018 semakin kecil artinya gap atau kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan dari target yang ditetapkan semakin baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelatihan yang diselenggarakan adalah pelatihan tematik non aparatur dimana metode yang dilakukan adalah FGD sehingga materi yang diberikan sesuai yang diperlukan peserta. Hal ini menyebabkan nilai awal (pre test) yang diperoleh rendah sedangkan hasil akhirnya (post test) tinggi karena materi yang diperlukan sudah tersampaikan.

Metode penghitungan Competency Gap Index (CGI) di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian baru dimulai ditahun 2018 sehingga belum ada perhitungan CGI di tahun 2017.

Untuk mendukung pencapaian sasaran indikator Penurunan rata – rata competency gap index peserta pelatihan pertanian, BBPP Lembang telah menyelenggarakan 31 jenis pelatihan dengan target peserta sebanyak 3.125 orang dan terealisasi sebanyak 3.110 orang atau sebesar 99,52% yang terbagi dalam (1) pelatihan aparatur sebanyak 6 pelatihan (30 angkatan) dengan target

peserta sebanyak 862 orang dan terealisasi sebanyak 855 orang atau sebesar 99.19%; (2) pelatihan non aparatur sebanyak 25 pelatihan (74 angkatan) dengan target peserta sebanyak 2.263 orang dan terealisasi sebanyak 2.255 orang atau sebesar 99.65%. Secara rinci pencapaian kinerja pelatihan dapat dilihat pada **Tabel.13**

Tabel 13
Pencapaian Kinerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur
BBPP Lembang Tahun 2018

Kegiatan	Target		Realisasi		%
1	2		3		4
Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur	3.125	Orang	3.110	Orang	99.52
I. Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pelatihan	862	Orang	855	Orang	99.19
1) Pelatihan Fungsional RIHP	768	Orang	761	Orang	99,09
1 Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh bagi CPNS dari THL TBPP	286	Orang	284	Orang	100.00
2 Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh bagi CPNS dari THL TBPP POLA OJT	482	Orang	477	Orang	98.96
Kegiatan	Target		Realisasi		%
1	2		3		4
2) Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura	94	Orang	94	Orang	100.00
1 Pelatihan Teknis Hidroponik	30	Orang	30	Orang	100.00
2 Pelatihan Teknis Mitigasi Iklim	30	Orang	30	Orang	100.00
3 Pelatihan Teknis Pembuatan Pupuk dan Pestisida Organik	4	Orang	4	Orang	100.00
4 In House Training Peningkatan Kapasitas Kompetensi Bagi Pegawai	30	Orang	30	Orang	100.00
II. Jumlah non aparatur pertanian yang mengikuti pelatihan	2.263	Orang	2.255	Orang	99.65
1) Pelatihan Alsintan	458	Orang	458	Orang	100.00
1 Pelatihan Teknis Tematik Pengelolaan Alsintan dan Operator	270	Orang	270	Orang	100.00
2 Bimbingan Teknis Tematik Optimalisasi Pemnafaatan Alsintan	188	Orang	188	Orang	100.00
2) Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura	1.325	Orang	1.317	Orang	99,39
1 Pelatihan Teknis Tematik Cabai di Provinsi Jawa Barat	40	Orang	40	Orang	100.00

2	Pelatihan Teknis Tematik Cabai di Provinsi Maluku Utara	20	Orang	20	Orang	100.00
3	Pelatihan Teknis Tematik Cabai di Provinsi Papua Barat	20	Orang	20	Orang	100.00
4	Pelatihan Teknis Tematik Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat	30	Orang	30	Orang	100.00
5	Pelatihan Teknis Tematik Desa Organik di Provinsi Jawa Barat	30	Orang	30	Orang	100.00
6	Agri Training Camp	30	Orang	30	Orang	100.00
7	Pelatihan Teknis Tematik Bawang Putih di Provinsi Jawa Barat	30	Orang	30	Orang	100.00
8	Pelatihan Teknis Agribisnis Sayuran	600	Orang	600	Orang	100.00
9	Pelatihan Pemuda Tani	30	Orang	300	Orang	100.00
10	Pelatihan Penguatan Kapasitas Dalam Pendampingan Bagi Penyuluh Pertanian	30	Orang	30	Orang	100.00
11	Bimbingan Teknis Kelembagaan Petani	30	Orang	22	Orang	73.33
12	Bimbingan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan	360	Orang	360	Orang	100.00
13	Pelatihan Teknis KRPL	45	Orang	45	Orang	100.00
Kegiatan		Target		Realisasi		%
1		2		3		4
14	In House Training Kelembagaan Petani	30	Orang	30	Orang	100.00
3) Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan		150	Orang	150	Orang	100.00
1	Pelatihan Teknis Tematik Kopi di Provinsi Jawa Barat	30	Orang	30	Orang	100.00
2	Pelatihan Teknis Tematik Kakao di Provinsi Papua Barat	30	Orang	30	Orang	100.00
3	Pelatihan Teknis Tematik Kelapa di Provinsi Banten	20	Orang	20	Orang	100.00
4	Pelatihan Teknis Tematik Kelapa di Provinsi Jawa Barat	30	Orang	30	Orang	100.00
5	Pelatihan Teknis Tematik Kelapa di Provinsi Maluku Utara	20	Orang	20	Orang	100.00
6	Pelatihan Teknis Tematik Kelapa di Provinsi Papua Barat	20	Orang	20	Orang	100.00
4) Pelatihan Teknis Tematik Jagung dan Kedelai		330	Orang	330	Orang	100.00
1	Pelatihan Teknis Tematik Kedelai di Provinsi Banten	30	Orang	30	Orang	100.00
2	Pelatihan Teknis Tematik Kedelai di Provinsi Jawa Barat	270	Orang	270	Orang	100.00
3	Pelatihan Teknis Tematik Jagung	30	Orang	30	Orang	100.00

Jika dilihat rata rata pencapaian kinerja tahun 2018 pada kegiatan pelatihan aparatur, tingkat realisasi fisik yang paling kecil terdapat pada kegiatan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh bagi CPNS dari THL TBPP POLA OJT dimana capaian kinerjanya sebesar 98,96%, hal ini disebabkan karena beberapa calon peserta belum sesuai dengan persyaratan pelatihan dimana salah satu persyaratan untuk diklat ini adalah calon peserta sudah mengikuti diklat prajabatan. Sedangkan pada kegiatan pelatihan non aparatur realisasi fisik yang paling kecil terdapat pada kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan Petani dimana capaian kinerjanya hanya mencapai 73,33% dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan, beberapa P4S memiliki kegiatan yang bersamaan yang tidak dapat ditinggalkan menyebabkan beberapa P4S terkendala kehadirannya. Namun demikian dilihat dari rata-rata keseluruhan realisasi fisik sebesar 99,52% kegiatan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian masuk dalam kategori “**Berhasil**”.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan baik aparatur maupun non aparatur terdapat 6 (enam) aspek evaluasi yang dilakukan selama diklat berlangsung yaitu : (1) Monitoring Harian (Daily Mood) Peserta; (2) Monitoring Kesesuaian Tempat Praktek Lapangan; (3) Evaluasi Penguasaan/ Pemahaman Materi; (4) Evaluasi Sikap Perilaku Peserta; (5) Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Fasilitator; (6) Evaluasi Kepuasan Peserta. Berdasarkan Nilai Hasil Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan sepanjang tahun 2018, diperoleh rata rata sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 14
Nilai Rata-Rata Hasil Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelatihan Di BBPP Lembang Tahun 2018

No.	Aspek Evaluasi	Aparatur	Non Aparatur	Kategori
1.	Monitoring Harian (Daily Mood) Peserta	2,82	2,90	Senang
2.	Evaluasi Pemahaman Materi	4,21	4,04	Menguasai
3.	Peningkatan Berlatih (Pree Test - Post Test)	66,78	89,4	Memuaskan

4.	Evaluasi Terhadap Sikap dan Perilaku Peserta	83,76	76,99	Baik
5.	Evaluasi Terhadap Fasilitator Diklat	4,68	4,41	Baik
6.	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Diklat	93,54	2,82 (94,00)	Sangat Puas

Dari hasil rekapitulasi nilai Rata-Rata Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan dapat disimpulkan baik evaluasi untuk peserta, fasilitator maupun penyelenggaraan pelatihan, masuk dalam kategori “Baik”.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BBPP Lembang

3. Indikator : Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Lembang yang terjadi berulang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. LHP ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2018 BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Belanja Pemerintah dan Belanja yang berasal dari APBN Kementerian Pertanian TA. 2018. Tujuan pemeriksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menilai kesesuaian proses perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan serta pertanggungjawaban belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat

2. Menilai kesesuaian proses perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan serta pertanggungjawaban belanja barang yang dibiayai dari pinjaman IBRD lingkup Kementerian Pertanian TA 2016 – 2018

Dari hasil pemeriksaan tersebut baik dari tahun berjalan dan laporan tahun sebelumnya tidak terdapat temuan BPK pada kategori yang sama di kedua tahun tersebut terkait kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010)

4. Indikator Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan kinerja
2. Penilaian terhadap pengukuran kinerja
3. Penilaian terhadap pelaporan kinerja
4. Penilaian terhadap evaluasi internal
5. Penilaian terhadap capaian kinerja

Pada Tahun 2018, belum dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di BBPP Lembang.